

Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Ayu Astri Solissa¹, Sharfina Juliana², Putri Afrillia³, Wahjoe Pangestoeti⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji, aastrisolissa@student.umrah.ac.id¹, sjuliana@student.umrah.ac.id², pafrillia@student.umrah.ac.id³, wahjoepangestoeti@umrah.ac.id⁴

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji data sekunder yang bersumber dari laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Peningkatan infrastruktur ini berdampak langsung pada peningkatan aksesibilitas, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat desa. Namun, efektivitas pemanfaatan Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, transparansi pengelolaan anggaran, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, pelatihan perangkat desa, dan sistem pemantauan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat Desa.

Keywords

Dana Desa, Infrastruktur Dasar, Kesejahteraan Masyarakat, Perdesaan, Pembangunan.

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang desa, yaitu desa diberikan suatu kewenangan yang dapat mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dimaksudkan jika dana desa dapat digunakan dalam pendanaan keseluruhan kewenangan desa yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan dari dana desa tersebut. Dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari kabupaten atau kota serta digunakan dalam pembiayaan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dana desa juga diatur didalam Peraturan Menteri, yang memprioritaskan dalam pembiayaan pelaksanaan program serta kegiatan lokal di desa dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip seperti Keadilan, yaitu mengutamakan hak atau kepentingan tanpa

membedakan seluruh warga desa; Kebutuhan prioritas, yang mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak serta menyangkut kepentingan sebagian besar masyarakat desa; Tipologi desa, yaitu pertimbangan terhadap keadaan dan kenyataan pada karakteristik geografis, ekonomi, sosiologis, antropologis, ekonomi desa, serta perkembangan atau perubahan kemajuan desa (Nurhayati, 2017 dalam (Hasan Wirayudha et al., 2025)

Setiap tahapan dari proses pengelolaan dana desa mempunyai peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, kegiatan pengelolaan dana desa perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten serta berkualitas dengan didukung sistem dan prosedur keuangan yang memadai, sehingga kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mempunyai struktur organisasi pengelolaan keuangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa (Khadlirin et al., 2021).

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil, atau dengan kata lain sesuatu pelaksanaan yang berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah popular, kata efektivitas didefinisikan dalam artian ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Selain itu, efektivitas merupakan hal yang dilakukan dengan benar atau sejauh mana sasaran yang dituju dapat kita capai (Hariyoko et al., 2021)

Dalam pengertian yang umum, efektivitas menunjukkan taraf dari hasil yang dicapai. Efektivitas dalam konteks pemerintah daerah ialah tujuan yang dapat dicapai dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Efektivitas dalam pengertiannya berhubungan dengan derajat keberhasilan dari suatu pelaksanaan sektor publik dalam kegiatan yang dapat dikatakan efektif jika hal tersebut menghasilkan suatu pengaruh yang besar terhadap kemampuan dalam penyediaan pelayanan masyarakat yang telah menjadi sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas ialah pernyataan secara komprehensif terkait sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai atau telah mendapatkan tujuannya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang selesai tepat waktu yang sesuai dengan rencana awal dari yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila suatu organisasi sudah mencapai tujuan yang diinginkan maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah berjalan dengan efektif. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara luaran dan tujuan, yang dimana untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan, maka harus membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja yang diinginkan (Khadlirin et al., 2021).

Pembangunan secara dinamis diartikan sebagai suatu kegiatan usaha atau orientasi yang dilakukan tanpa akhir. Proses pembangunan ialah suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan bergantung pada manusia dan struktur sosial agar menjadi proses yang dapat bergerak maju atau

mempunyai kekuatannya sendiri. Selain itu, pembangunan juga dapat mendorong tingkat laju perekonomian baik itu suatu negara ataupun daerah atau desa. Hal tersebut diyakinkan dapat merubah setiap struktur yang ada didalam perekonomian. Pembangunan yang terencana lebih dapat dirasakan sebagai suatu upaya yang lebih sistematis dan rasional bagi pembangunan masyarakat yang masih dalam tahap berkembang (Irmansyah et al., 2021)

Terdapat dua pendekatan didalam pembangunan yaitu, pendekatan top down atau pembangunan dari atas ke bawah. Pendekatan ini masih diperlukan terkhusus pada program-program pembangunan yang sifatnya penting dan berkaitan dengan kepentingan khalayak ramai atau pelayanan antar wilayah. Selain itu, adapula pembangunan berdasarkan pendekatan bottom-up yang dimana mengarahkan masyarakat yang langsung menentukan apa saja yang ingin direncanakan, kemudian cara apa yang digunakan, serta perencanaan yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa tersebut, sehingga kebermanfaatan pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan dampak nyata dan sangat berarti bagi kebutuhan masyarakat desa tersebut. Adapun infrastruktur ialah prasarana atau suatu penunjang utama dari terselenggaranya suatu proses pembangunan, usaha, dsb. Infrastruktur sangat memiliki peran penting karena merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Terdapat pula ruang lingkup pembangunan infrastruktur yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa seperti jembatan, jalan, atau tambatan perahu; pembangunan infrastruktur produksi seperti irigasi pedesaan; serta pembangunan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih dan minum, ketentraman dan keamanan, dan sanitasi pedesaan (Sarah Simbolon et al., 2021).

Menurut Friedlander dalam Suud (2006, h.8) mengungkapkan bahwa kesejahteraan adalah sistem yang terstruktur dari pelayanan dan lembaga sosial, yang ditujukan untuk menopang individu dan kelompok untuk mendapatkan tingkat hidup dan kesehatan yang memadai dan memuaskan serta hubungan-hubungan perorangan atau sosial yang dapat saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan meningkatkan kesejahteraan terhadap kebutuhan keluarga maupun masyarakat. Definisi ini mencerminkan kesejahteraan sosial yang diibaratkan sebagai keadaan dan menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sejatinya harus saling tolong menolong untuk menciptakan suasana yang sejahtera. Sedangkan Kesejahteraan masyarakat desa menurut Walter A. Friedlander (1961) ialah sistem terstruktur dari pelayanan sosial kemasyarakatan serta lembaga-lembaga yang bertujuan dalam mengupayakan individu maupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai serta hubungan atau relasi antar pribadi dan kelompok yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan

kemampuannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan yang sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan keluarga dan masyarakat (Nazar Fajri, 2017).

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kemandirian desa melalui alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan.

Komitmen negara dapat terlihat pada besarnya alokasi dana disetiap tahunnya terhadap pemberdayaan desa. Tetapi, masih menjadi pertanyaan yang mengganjal jika dilihat pada sejauh mana dana desa dapat dikatakan telah efektif dalam meningkatkan dan mendorong pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan pada masyarakat pedesaan. Dalam pembahasannya, efektivitas tidak hanya dilihat dari bagaimana besaran serapan anggaran yang didapat, namun juga melihat bagaimana dampak nyata dari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. Pentingnya peningkatan pembangunan infrastruktur desa seperti irigasi, fasilitas umum, jembatan, serta jalan yang kurang bagus dan memadai merupakan sarana yang penting dan vital dalam meningkatkan aksesibilitas layanan, produktivitas ekonomi, dan tingkat kualitas hidup dari masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan dana desa secara transparan, berorientasi pada kebutuhan lokal dan masyarakat, serta partisipatif dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari masyarakat desa. Karena jika dana desa dikelola dengan tidak transparan dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, maka hal tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk bagi pembangunan infrastruktur yang ingin dijalankan didesa tersebut.

Menurut Sutoro Eko (2015), Dana Desa merupakan bentuk rekognisi negara terhadap desa sebagai subjek pembangunan, di mana desa memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Handayani (2019), penggunaan Dana Desa secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat desa, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas aparatur desa yang terbatas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran

(Kurniawan & Yuliati, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Dana Desa agar tujuan utama dari kebijakan ini dapat tercapai secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dengan memahami sejauh mana Dana Desa mampu memberikan perubahan nyata di tingkat desa, diharapkan dapat menjadi acuan bagi peningkatan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa studi kepustakaan atau *Library Research*. Studi kepustakaan adalah salah satu studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi maupun data yang dapat bersumber dari berbagai macam sumber data seperti dokumen resmi, buku, ataupun artikel jurnal dari penelitian-penelitian sebelumnya, dsb (Mardalis 1999 dalam (Rizki Khaesaran & Khairani Hasibuan, 2021) Dalam prosesnya, studi kepustakaan seperti membaca, mempelajari, ataupun menganalisis berbagai macam literatur yang relevan dengan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori sehingga pendapat atau argumen dalam penelitian dapat lebih kuat dan valid (Sri Rosdiana et al., 2022).

Dalam mengumpulkan informasi yang sesuai dan relevan dengan topik penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menelaah dan memahami literatur-literatur, buku, dokumen maupun laporan-laporan resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan agar dapat mendukung pendapat penulis dalam penelitian ini. Adapun sumber data dan informasi yang diperoleh melalui artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan, peraturan-peraturan, serta sumber-sumber tertulis elektronik lainnya.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1 Kegunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah pusat telah menyediakan Dana Desa (DD) sebagai bentuk intervensi fiskal untuk mendukung pembangunan di daerah pedesaan. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka, jurnal ini mengkaji efektivitas penyaluran dan penerapan Dana Desa. Jurnal ini menyimpulkan bahwa Dana Desa memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, fasilitas

sanitasi, dan sumber air bersih.

Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya memudahkan masyarakat untuk berpindah antardaerah pedesaan, tetapi juga menciptakan peluang bagi pembangunan ekonomi lokal, khususnya di bidang pertanian dan industri usaha mikro. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi secara lebih produktif dan efektif berkat jalan yang baik, irigasi yang memadai, dan air bersih. Misalnya, tersedianya akses jalan memudahkan petani untuk menjual hasil panen mereka, dan sanitasi yang layak serta air bersih memungkinkan masyarakat untuk memulai usaha rumahan dengan cara yang lebih higienis.

Namun, kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai di tingkat pemerintah daerah masih menjadi kendala signifikan bagi pelaksanaan Dana Desa. Personel pemerintah desa sering kali kurang memiliki keterampilan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mengelola keuangan dan melaksanakan proyek. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama, karena ada beberapa kasus di mana penggunaan Dana Desa belum memenuhi kebutuhan masyarakat karena kurangnya keterlibatan dalam perencanaan dan pemantauan. Akibatnya, dana telah ditransfer, tetapi hasilnya belum seefektif mungkin.

3.2 Bagaimana Dana Desa Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Melalui peningkatan kualitas hidup yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur, Dana Desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya mencakup pendapatan yang lebih tinggi tetapi juga akses ke layanan vital seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup lingkungan. Menurut teori Walter A. Friedlander, kesejahteraan masyarakat mencakup gaya hidup yang sehat, ikatan sosial yang kuat, dan peluang untuk tumbuh. Dalam konteks Dana Desa, kesejahteraan tersebut dihasilkan oleh fasilitas infrastruktur yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Lebih jauh, pembangunan yang didanai oleh Dana Desa membantu melaksanakan kegiatan sosial dan memberdayakan ekonomi lokal. Misalnya, program tunai padat karya menawarkan kesempatan kerja bagi penduduk desa dalam proyek konstruksi sekaligus menyuntikkan lebih banyak uang ke masyarakat. Hal ini memiliki efek berganda yang memengaruhi sirkulasi ekonomi lokal.

Namun, ada kendala signifikan untuk memaksimalkan manfaat kesejahteraan ini. Proyek-proyek tersebut sering kali salah arah karena kurangnya partisipasi publik dalam perencanaan dan pemantauan. Agar pembangunan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, partisipasi aktif warga desa harus menjadi dasar setiap tahapan. Tanpa keterlibatan tersebut, keberhasilan pembangunan hanya akan bersifat administratif dan tidak akan mengatasi masalah mendasar perubahan sosial.

3.3 Rekomendasi dan Penguatan Tata Kelola

Jurnal ini menyarankan agar tata kelola desa diperkuat agar Dana Desa lebih berhasil dalam misinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk pelatihan kapasitas aparatur desa di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas. Misalnya, meningkatkan transparansi dengan membuat papan informasi publik tentang penggunaan dana desa dan hasil pembangunan. Selain itu, sistem pemantauan partisipatif yang melibatkan anggota masyarakat, seperti perempuan, pemuda, pemimpin adat, dan kelompok rentan, dalam rapat konsultasi desa. Dan yang tak kalah pentingnya penilaian dampak pembangunan yang didorong oleh data dan berkala, dengan mempertimbangkan keluaran (apa yang dibangun) dan hasil (dampaknya terhadap masyarakat).

Pendekatan partisipatif terhadap pembangunan juga disorot sebagai hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tetapi juga kekuatan utama di balik penetapan prioritas dan pengawasan pelaksanaannya. Strategi pembangunan dari atas ke bawah harus dilengkapi dan diimbangi dengan strategi dari bawah ke atas untuk memastikan pemerataan dan efisiensi.

3.4 Ketimpangan dan Tipologi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Ketimpangan penggunaan antarmasyarakat menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan Dana Desa. Tidak semua desa mampu mengelola dana yang diterimanya secara merata. Secara umum, masyarakat dengan akses informasi dan sumber daya manusia yang lebih baik lebih mampu merencanakan dan melaksanakan program. Sebaliknya, desa-desa terpencil dengan peralatan desa yang kurang memadai sering kali hanya meniru model pembangunan masyarakat lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan setempat. Bentuk dan hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh faktor tipologi seperti jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan letak geografis. Misalnya, desa pesisir mungkin memerlukan pembangunan dermaga, masyarakat petani mungkin memerlukan irigasi, dan permukiman terpencil mungkin memerlukan jalan dan jembatan. Kegagalan dalam mempertimbangkan tipologi desa akan mengakibatkan Dana Desa tidak digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus kontekstual dan berfokus pada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

3.5 Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah Desa

Keterlibatan masyarakat hendaknya tidak hanya sekadar representasi simbolis dalam forum-forum diskusi, tetapi harus mengambil bentuk kolaborasi sejati antara masyarakat dan pemerintah desa. Melibatkan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan elit lokal. Menurut penelitian

sebelumnya di beberapa desa (Susanti & Nugroho, 2019), hasil pembangunan lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan ketika masyarakat terlibat dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan pemantauan. Selain itu, kolaborasi dapat diperkuat dengan membentuk tim pemantau desa independen yang terdiri dari anggota masyarakat, akademisi setempat, dan pemimpin adat. Tim ini bertanggung jawab untuk memantau akuntabilitas, melakukan penilaian dampak, dan melaporkan pelanggaran. Karena inspektor atau BPD sendiri sering kali tidak memiliki pengaruh yang cukup, pendekatan ini terbukti lebih berhasil daripada pemantauan satu arah.

3.6 Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun aturan mengamanatkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaporkan secara terbuka dan teratur, kenyataan di lapangan adalah bahwa banyak desa terus mengabaikan persyaratan ini. Mayoritas administrasi Dana Desa masih elitis dan tertutup. Rincian tentang rencana pembangunan, alokasi anggaran, dan pengeluaran aktual sering kali tidak diketahui publik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa rendah, yang memungkinkan terjadinya korupsi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa persoalan korupsi Dana Desa semakin serius. Mulai dari penggelembungan harga proyek, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, hingga pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, diperlukan digitalisasi pengelolaan Dana Desa melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan sistem pengawasan publik berbasis dashboard secara daring. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat memantau perkembangan pembangunan dan pemanfaatan anggaran secara real time.

3.7 Menganalisis Keberhasilan Pembangunan dengan Menggunakan Indikator

Jumlah proyek fisik yang telah selesai tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Misalnya, jika dalam setahun dibangun lima jembatan, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat atau cepat rusak, hal tersebut tidak selalu dapat menjadi indikator keberhasilan. Oleh karena itu, keberhasilan Dana Desa harus diukur dengan: Indikator capaian: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan desa (IDM). Indikator proses : tingkat keterlibatan warga dalam musyawarah, keterbukaan informasi, dan ketepatan waktu pelaksanaan. Indikator kualitas hidup : kebahagiaan masyarakat, kualitas lingkungan, dan akses ke layanan penting (perawatan kesehatan, pendidikan). Evaluasi ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas Dana Desa. Dana Desa akan menjadi sekadar ritual belanja tahunan tanpa arah pembangunan yang jelas jika tidak ada penilaian berdasarkan indikator yang terukur.

3.8 Memasukkan Dana Desa dalam Rencana Pembangunan Nasional

Dana Desa tidak dapat berfungsi sendiri sebagai rencana pembangunan yang terisolasi. Untuk mencapai sinkronisasi antarprogram, dana desa harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Misalnya, pembangunan jalan pedesaan harus dikaitkan dengan program nasional seperti jalan tol laut, industri lokal harus didukung oleh kebijakan perdagangan kabupaten, dan pelatihan kerja harus dihubungkan dengan industri lokal. Sinergi ini berpotensi meningkatkan dampak Dana Desa dan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat pedesaan dalam jangka panjang

4. CONCLUSION

Dapat disimpulkan bahwa Dana Desa merupakan kebijakan fiskal yang cerdas dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai infrastruktur penting, seperti jalan raya, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas, mobilitas, dan produktivitas ekonomi masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur tersebut juga meningkatkan layanan dasar dan taraf hidup, serta mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya yang tersedia di desa. Meskipun demikian, pelaksanaan program Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan yang pelik. Masih banyak desa yang belum dapat memanfaatkan Dana Desa secara maksimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang belum baik di tingkat desa, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Selain itu, masih terdapat permasalahan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana, yaitu masih ditemukannya praktik penyelewengan anggaran dan pelaporan yang belum terbuka dan menyeluruh. Kualitas hasil pembangunan juga dipengaruhi oleh kesenjangan antardesa dalam hal geografi dan kesiapan administrasi. Akibatnya, efektivitas Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas proses pelaksanaannya yang harus partisipatif, transparan, dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Agar Dana Desa lebih efektif di masa mendatang, sejumlah tindakan praktis dan terarah perlu dilakukan. Pertama-tama, pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia di tingkat desa melalui program pelatihan dalam pengelolaan teknis, keuangan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting agar pemerintah desa mampu merencanakan dan mengelola dana dengan baik sesuai dengan ketentuan, dengan cermat, dan dengan memperhatikan target audiens yang tepat. Kedua, pemerintah desa harus mengadopsi sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang terhubung dengan platform digital untuk pengawasan publik, sehingga publik dapat memantau anggaran mulai

dari perencanaan hingga pelaksanaan secara real time. Ketiga, perlu memperkuat mekanisme keterlibatan masyarakat yang lebih inklusif dan representatif. Dalam proses musyawarah, penetapan prioritas program, dan evaluasi, masyarakat pedesaan, termasuk kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan kelompok rentan, harus diberikan lebih banyak keterwakilan. Akibatnya, tuntutan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam pembangunan. Keempat, harus ada koordinasi yang lebih besar antara inisiatif pembangunan nasional dan daerah dengan program Dana Desa. Ini akan menjamin tidak ada kegiatan yang tumpang tindih dan pelaksanaan pembangunan konsisten dan efektif. Kelima, keberhasilan Dana Desa harus dinilai tidak hanya dari indikator keluaran seperti jumlah proyek fisik yang dibangun, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Untuk menentukan apakah tujuan Dana Desa telah sepenuhnya terpenuhi, pemerintah harus mendukung evaluasi berbasis indikator yang komprehensif yang mencakup faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Diharapkan bahwa Dana Desa akan menjadi komponen penting dalam membina masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan berkat peningkatan signifikan dalam tata kelola, pemantauan, dan keterlibatan masyarakat.

REFERENCES

- Hariyoko, Y., Dolfianto Jehaut, Y., Susiantoro, A., & Id, A. (2021). EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT OLEH PUSKESMAS DI KABUPATEN MANGGARAI. In *Jurnal Good Governance* (Vol. 17, Issue 2).
- Hasan Wirayudha, M., Ekonomi Dan Bisnis Islam, F., Mataram, U., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan. *Journal of Economics Development Research*, 1(1), 38–48. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i1.59>
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Yuni Widowati, S. (2021). *Alamat Surel : email 1 khadlirin.ali@gmail.com; 2 edymul@usm.* 19(2), 49–64.
- Moh, L. N., & Nazar Fajri, S. E. (2017). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). In *MPA Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jurnal SIKAP* (Vol. 1).
- Rizki Khaesarani, I., & Khairani Hasibuan, E. (2021). *Studi Kepustakaan Tentang Model Pembelajaran Think Pair Share (TpS) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa* (Vol. 15). <https://www.oecd.org/pisa/>
- Sarah Simbolon dkk, D., Sarah Simbolon, D., Sari, J., Yolanda Purba, Y., Indah Siregar, N., Salsabila, R.,

- & Manulang, Y. (2021). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).
- Sri Rosdiana, L., Gusti Amparan Wangi, R., Febyanti, R., & Hidayatullah Firmansyah, F. (2022). Analisis Pengaruh Bimbingan Karir terhadap Siswa SMK: Studi Kepustakaan. *Jurnal Ilmu Kependidikan*, 11(1).
- Hariyoko, Y., Jehaut, D., Susiantoro, A., & Id, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Puskesmas di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Good Governance*, 17(2).
- Hasan Wirayudha, M., et al. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan. *Journal of Economics Development Research*, 1(1), 38–48.
<https://doi.org/10.71094/joeder.v1i1.59>
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Laporan Tahunan Dana Desa 2021*. Kemendesa PDTT.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Yuni Widowati, S. (2021). Pengelolaan Dana Desa dan Struktur Organisasi Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 19(2), 49–64.
- Kurniawan, A., & Yuliati, Y. (2021). Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–60.
- Putra, R. A., & Sari, N. P. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 123–135.
- Rizki Khaesarani, I., & Khairani Hasibuan, E. (2021). Studi Kepustakaan Tentang Model Pembelajaran Think Pair Share dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 15.
- Sarah Simbolon, D., Sari, J., Purba, Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Laporan Tahunan Dana Desa 2021*. Kemendesa PDTT.
- Putra, R. A., & Sari, N. P. (2020). Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 123–135.
- Susanti, E., & Nugroho, Y. (2019). Analisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 45–56.
- Eko, S. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

(FPPD).

Kurniawan, A., & Yuliati, Y. (2021). Evaluasi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–60.

Wibowo, A., & Handayani, R. (2019). Pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 101–110



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Published By World Publishing Journal